

**ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA BENGKULU**

Inayah Trinoviani

NPP. 29.0498

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Keuangan Publik*

Email: inayahtrinoviani03@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The author focuses on the Quality of Local Government Financial Reports at the Bengkulu City Financial and Asset Management Agency (BPKAD) to maintain an Unqualified Opinion (WTP). **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the Quality of Local Government Financial Reports at the Regional Financial and Asset Management Agency, the obstacles that occur in realizing quality Bengkulu City Government Financial Reports, and Efforts made to improve the quality of Financial Statements in maintaining a fair opinion. Without exception. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method and an analysis of the theory of LKPD Quality from Nurlan Darise. Data collection techniques were conducted by interview (7 informants), observation and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that it is known that the Quality of Local Government Financial Reports in Bengkulu City has been carried out and has received WTP opinions, but there are still some notes in the use of the LKPD. Obstacles in realizing a quality Bengkulu City LKPD are the presence of internal and external HR SKPD, employee mutations, implementation of reconciliation as well as facilities and infrastructure. **Conclusion:** The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) maintains an unqualified opinion by providing HR guidance, leadership commitment, stages of accelerating the preparation of LKPD and synergies of all components in SKPD/OPD. As well as implementing a series of efforts as follows: Orderly implementation of reconciliation, Maintaining leadership commitments in supporting the process of consolidation of Financial Statements, and Maintaining commitment to the plan to accelerate the preparation of Regional Government Financial Reports.

Keywords: Analysis; Quality; Local Government Financial Report

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penulis berfokus pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu untuk mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Hambatan yang terjadi dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang berkualitas, dan Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap teori Kualitas LKPD dari Nurlan Darise. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (7 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu diketahui bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu telah dilaksanakan dan mendapatkan opini WTP, namun masih ada beberapa catatan di dalam penggunaannya LKPDnya. Hambatan dalam mewujudkan LKPD Kota Bengkulu yang berkualitas adalah keberadaan SDM internal maupun eksternal SKPD, mutasi pegawai, pelaksanaan rekonsiliasi serta sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan melakukan bimbingan SDM, komitmen pimpinan, tahapan percepatan penyusunan LKPD dan sinergi seluruh komponen dalam SKPD/OPD. Serta menerapkan serangkaian upaya sebagai berikut: Tertib pelaksanaan rekonsiliasi, Menjaga komitmen pimpinan dalam mendukung proses konsolidasi Laporan Keuangan, dan Menjaga komitmen rencana percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Analisis; Kualitas; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan sistem sebuah pemerintahan desentralisasi yang diidentifikasi sebagai pemberian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah, dimana melingkupi tugas nasional pemerintah pusat di daerah otonom, yang sesuai dengan prinsip otonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah memikul kewenangan serta bertanggung jawab dalam mengatur perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan daerahnya sendiri. Pembagian desentralisasi dibagi menjadi tiga bagian: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi keuangan. Desentralisasi dilakukan untuk mendukung semua kegiatan desentralisasi politik dan administrasi. Tanpa desentralisasi fiskal, negara akan menghadapi hambatan keuangan untuk menyediakan layanan berkualitas kepada komunitas mereka. Dengan menempatkan instansi pemerintah tertentu di daerah tersebut, mereka menerima berbagai sumber pendapatan.

Sebagai sebuah lembaga atau badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus melaksanakan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab. Saat ini sangat penting untuk berpartisipasi dalam pembentukan sistem pemerintahan dengan kualitas good corporate govermen, bagian pemerintah daerah yang berkomitmen dalam pengelolaan keuangan di daerah atau APBD tidak dapat dipisahkan, demikian pula pemerintah daerah yang memikul dan memiliki tanggung jawab atas anggaran pemerintah daerah yang terkait dengan pekerjaan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat tidak dapat dipisahkan. (Sakti & Masitoh, 2018)

Perkembangan teknologi dan ekonomi serta penguasaan negara yang demokratis, bersih, adil, transparan dan bertanggung jawab. Maka pemerintah membutuhkan sebuah sistem tata kelola pemerintahan terkelola dengan baik. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu bentuk keberhasilan pengelolaan aset pemerintah, di mana keuangan merupakan hal yang paling penting. Pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan bertanggungjawab di pusat pemerintahan dan di daerah merupakan indikator penting bagi terselenggaranya Good Governance yang baik. Menurut Efendi (2021): Good Governance, adalah merupakan bentuk penatakelolaan sebuah sistem pemerintahan dengan benar dalam pemerintahan yang demokratis yang mampu dan mengatur berbagai keberadaan sumberdaya alam dan sosial serta perekonomian dengan baik menurut prinsip musyawarah dan

mufakat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan kas daerah secara mandiri guna meningkatkan tanggung jawab pengelolaan kas suatu daerah yang lebih benar, efisien dan adanya transparansi anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mewujudkan sarana untuk memenuhi tanggung jawab departemen keuangan dalam bentuk laporan tahunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka sebuah pemerintah di daerah memiliki tanggungan yang sifatnya wajib untuk dapat memberikan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi serta berkualitas. Menurut (Ramdani & Agustina, 2019) menjelaskan bahwa kualitas adalah evaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban untuk sesuatu baik dari segi aset berwujud sebagai aset dan aset tidak berwujud sebagai aset Kualitas berarti bahwa pimpinan di suatu daerah wajib dalam memberikan tanggungjawab untuk menjalankan organisasi sesuai dengan wewenang yang didelegasikan kepada kepala daerah.

Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pimpinan daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang memberikan laporan tanggung jawab tertulis mengenai hasil pemanfaatan APBD kepada DPRD dalam wujud laporan keuangan dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kurun waktu setelah enam bulan atau 1 semester setelah berakhirnya tahun anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah lembaga audit eksternal di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengkaji laporan pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah. Penyelidikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik ini bertujuan untuk menegakkan hukum negara terkait dengan penipuan keuangan.

Opini BPK terhadap penyajian laporan tahunan merupakan salah satu indikator kualitas laporan tahunan. Predikat yang diperloeh oleh pemerintah daerah kota Bengkulu didasari dengan adanya tahapan opini BPK secara bertingkat terdiri dari (<https://www.bpk.go.id/id>, 2020) yakni : opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan penilaian Tidak Wajar (TW), serta opsi pemberian penilaian Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini terhadap LKPD yang wajar tanpa pengecualian dengan nama lain WTP, bukan berarti sebuah laporan keuangan itu clean and clear atau benar – benar tanpa catatan, terbukti dengan masih terdapat kelemahan aparatur dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap penyusunan laporan keuangan Bengkulu. Untuk menindaklanjuti hasil BPK tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan upaya perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangannya, khususnya pada BPKAD Kota Bengkulu sebagai konsolidator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan catatan kelemahan tersebut, maka BPK memberikan rekomendasi untuk perangkat daerah yang terdapat kelemahan tersebut, antara lain BPPD, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, BPKAD, Sekretariat DPRD, dan Dinas Kesehatan. Hal Ini menjadi indikasi di perangkat daerah masih lemah dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam PerPu RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) kerangka konseptual bahwa keempat jenis karakteristik yang sifatnya kualitatif terhadap laporan keuangan sebagai prasyarat normatif supaya dapat membentuk laporan keuangan dari sebuah pemerintah daerah memiliki dan memenuhi kualitas / mutu yang di

kehendaki, yaitu : (1) laporan keuangan yang Relevan; (2) memiliki keandalan; (3) sifatnya dapat dibandingkan dengan laporan lainnya dalam hal keuangan dan (4) Dapat mudah dipahami. Terpenuhinya keempat karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat memberikan kepastian akan tercapainya suatu tujuan tertentu dan sebagai bentuk penyajian dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Bengkulu akan menjadi berkualitas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Nining Asniar Ridzal berjudul *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton*, menemukan bahwa keberadaan kualitas laporan dari keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Buton. Penelitian kedua dengan judul serupa di Kabupaten Serdang Bedagai oleh Aulia, 2017 menyatakan bahwa secara parsial kualitas SDM, SAP, SPI, serta pemanfaatan TI memiliki pengaruh dan dampak terhadap bentuk kualitas mutu dari penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ketiga, dilakukan oleh Dermawan, et al, 2016 dengan judul *Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh* menemukan bahwasanya melalui penerapan unsur-unsur nilai normatif karakteristik kualitatif yang ada dalam pelaporan keuangan, sehingga mampu memberikan peningkatan kualitas mutu keberadaan pelaporan keuangan yang ada di satker KPPN Banda Aceh. Keempat, penelitian Merliana, 2020 dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)* menyimpulkan bahwa kondisi SDM, pengendalian internal dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh secara serempak terhadap kualitas mutu informasi laporan keuangan daerah. Dan yang terakhir, atau yang kelima penelitian oleh Wurasih, 2018 dengan judul *Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)* mendapatkan hasil bahwa Kualitas SDM memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap mutu laporan keuangan, serta Penggunaan SIA tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu laporan keuangan, keberadaan SPI berpengaruh cukup signifikan pada mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan berada di BPKAD Bengkulu, serta pada penelitian ini peneliti berfokus untuk menganalisa indikator penelitian menggunakan karakteristik kualitatif kualitas laporan keuangan dan menggunakan metode kualitatif. Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan lokasi dan juga spesifikasi penelitian dimana pada penelitian-penelitian serupa ditemukan spesifikasi berupa analisis faktor (seperti pada judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)* oleh Merliana, 2020; serta judul *Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)* oleh Wurasih, 2018) serta analisis kualitas (seperti pada judul *Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh* oleh Dermawan et al, 2016) dimana kedua hal tersebut

berbeda dan memiliki hasil dengan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada analisis kualitas laporan keuangan dan juga menggali lebih lanjut apa saja hambatan yang terjadi didalamnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu; Untuk mengetahui hambatan terhadap terwujudnya laporan keuangan pemerintah Kota Bengkulu yang berkualitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dan; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan opini wajar tanpa pengecualian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Desain penelitian adalah frame work yang dipakai guna melakukan penelitian, dikemukakan Radjab & Jam'an (2017: 73) adalah menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh data mentah dan mewakili yang dibuat dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sehingga, sebuah pelaksanaan penelitian yang baik mengarah pada proses penelitian yang efektif dan efisien. Penelitian deskriptif menggunakan kata-kata dan angka untuk 'memahami' dan tujuan utamanya adalah menyajikan profil (masalah), mencetak peta jalan atau menganalisis siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Berisi jawaban atas pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan, Kabid Aset, Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan, Kasubbid Permodalan dan Pembiayaan, dan dua orang Staf Pembukuan dan Pelaporan di BPKAD Kota Bengkulu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu merupakan OPD yang memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Keuangan aset daerah Kota Bengkulu. Adapun tugas dan fungsi BPKAD Kota Bengkulu adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dibidang keuangan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam pelaksanaannya laporan keuangan tidak terlepas dari beberapa regulasi terkait. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO dan beban dalam Laporan Operasional, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima

oleh Bendahara Penerimaan, diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah (BUD termasuk pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri dan pendapatan dari entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran mendapatkan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kota Bengkulu tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan SKPD tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, didalamnya disusun karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri atas : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori Nurlan Darise (2008) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang membagi karakteristik kualitatif kualitas suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi: Relevan; Andal; Dapat Dibandingkan; dan Dapat Dipahami.

Selain Standar Akuntansi Pemerintahan yang Pemerintah Daerah gunakan, untuk melihat manfaat balik dari sebuah laporan keuangan pemerintah daerah itu juga kita harus lihat dari kritik atau masukan oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan manfaat laporan keuangan serta akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan hal diatas, kualitas kebijakan pemerintah, menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun laporan keuangan yang memiliki feedback value. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi-informasi yang cukup untuk para pengguna laporan keuangan lainnya mengoreksi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal dimensi relevan untuk efektivitas laporan keuangan sudah mampu dipenuhi oleh pihak pemerintah kota Bengkulu dalam; hal ini BPKAD Kota Bengkulu. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor di atas, penulis telah memberikan komentar atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu 2019-2021 (LKPD). Sebagaimana dijelaskan penulis pada pengukuran sebelumnya, penulis menggunakan data dari Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) 2019- 2021 dan Perbandingan Anggaran 2019-2021 untuk mendukung pengukuran dengan manfaat prediktif. Program penyusunan LKPD dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, sesuai dengan permintaan BPK serta jadwal yang ditentukan yakni 2 bulan sedangkan untuk periode tahun 2022 ini penugasan oleh BPK dalam membuat LKPD dipercepat yakni diharapkan selesai pada tanggal 15 Pebruari 2022, bertepatan dengan akan datangnya bulan Romadhon di tahun 2022. Laporan keuangan adalah konsolidasi seluruh SKPD yang nantinya akan jadi Laporan keuangan yang akan disajikan berupa LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan prinsip pengungkapan penuh menyatakan bahwa laporan keuangan menyediakan pengguna dengan informasi lengkap (full Disclosure) yang mereka butuhkan. Penerima laporan tahunan dapat mempublikasikan informasi yang diinginkan dalam neraca atau laporan tahunan (CaLK) sehingga dimensi dari lengkap dalam laporan keuangan yang disajikan sudah terpenuhi.

Audit dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP. Laporan keuangan Pemerintah daerah yang telah diaudit (LKPD) diserahkan kepada BPK untuk diperiksa sebagai bagian dari pernyataan (saran/opini). Melakukan kegiatan evaluasi seringkali memiliki kesamaan dengan melakukan kegiatan audit, sehingga ada batasan yang membedakan antara evaluasi dan audit. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa instansi yang terlibat dalam menguji atau memverifikasi sebuah LKPD. Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Bengkulu sudah dapat Mempertahankan pelaporannya dan dinilai dapat diverifikasi dimana informasi yang disajikan sudah lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda. Reviu atau pemeriksaan ini dalam rangka menghasilkan sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang andal agar dapat menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ialah laporan keuangan yang memang sesuai dengan pelaksanaan anggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya serta penyajiannya memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dapat dikatakan pula laporan keuangan pada BPKAD Kota Bengkulu sudah andal dan memenuhi indikator netralitas.

LKPD Kota Bengkulu telah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk dapat dibandingkan LKPD yang mempunyai standar akuntansi yang sama. Standar akuntansi yang digunakan ialah SAP berbasis akrual. Namun dalam pelaksanaannya dapat terjadi perubahan kebijakan-kebijakan tergantung pada kondisi di daerah. Kota Bengkulu sendiri mempunyai kebijakan akuntansi LKPD tahun 2019-2021 yang tercantum di dalam Bab IV CaLK. Dengan adanya perbandingan ini tentunya dapat menjadi dasar penyempurnaan laporan keuangan setiap tahunnya. Kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang berhasil di capai di tahun 2021 adalah merupakan serangkaian proses panjang yang untuk penyusunannya harus dengan sinergi dan tanggung jawab oleh semua komponen di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu maupun OPD-OPD yang berada di dalam Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

3.1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang berkualitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Pasca kegiatan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam penyelenggaraan konsolidasi LKPD, hambatan-hambatan tersebut diduga mampu menghambat proses penyusunan LKPD. Pertama, pada SDM pengelola, latarbelakang pendidikan yang kurang mendukung pelaksanaan tugas ini perlu adanya sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan. Khusus terkait SDM sebagai pelaksana penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah, kondisi SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih kurang. Perlu ada penambahan pegawai yang berlatar belakang akuntansi yang handal untuk bisa menerapkan karakteristik kualitatif ini dengan baik. Selain itu juga perlu ada pemahaman mendasar untuk melaksanakan sistem SAP berbasis akrual tersebut dibutuhkan waktu dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya karena SDM pengelola keuangan saat ini hanya sebagaian saja yang memahami sistem tersebut. Para pegawai juga memerlukan diklat/bimtek secara berkelanjutan agar segala penghambat dalam pelaksanaan bisa di komunikasikan dalam diklat tersebut.

Kedua, perpindahan Pegawai Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah, pegawai yang dipindah dari SKPD semula ke SKPD lainnya, maka akan mengalami kesulitan dan butuh waktu untuk menyesuaikan dan melanjutkan tugas untuk menyusun laporan keuangan apalagi sebagian

besar SDM yang menangani pelaporan keuangan SKPD memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual ini yang banyak pegawai menganggapnya lebih rumit dibandingkan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Ketiga, kurangnya pelaksanaan rekonsiliasi, rekonsiliasi ini sangatlah penting, kita ketahui bahwa LKPD ini adalah laporan keuangan konsolidasian dari seluruh laporan keuangan di daerah yang perlu di sesuaikan antara BPKAD sebagai konsolidator laporan keuangan dengan perangkat daerah terkait penggunaan anggarannya.

Keempat, Sarana dan Prasarana yang mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum di upgrade masih menggunakan yang lama dengan tuntutan dan kerja yang tinggi tentu ini tidak seimbang haruslah di penuhi sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan Prasarana dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan faktor penting di dalam menunjang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam hal sarana dan prasarana tentunya menjadi faktor pendukung agar kesemua pekerjaan dapat tercapai secara maksimal. Bila sarana dan prasarana tidak memadai maka kegiatan tidak berjalan secara optimal.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sediannya harus memiliki perangkat komputer yang terbaru yang mendukung sistem informasi keuangan dan koneksi yang lancar. Berdasarkan jawaban tersebut maka diketahui bahwa secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan LKPD adalah dari sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas, dikarenakan terdapat anggota yang dirotasi atau dipindah tugaskan ke bagian lain, sehingga penggantinya masih harus memulai dari awal baik itu proses penyusunan, pemahaman soal peraturan-peraturan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan skill individunya.

3.2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian

Secara organisatoris tingkat profesionalisme dan tanggung jawab para staf dan pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dalam kondisi yang baik dan berupaya untuk selalu menjalankan tugas dan fungsi dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. SDM juga menjadi kunci Kota Bengkulu dapat mempertahankan opini WTP kembali Bagaimana intinya opini sebagai bonus. Setiap tahunnya kita terus belajar dan memperbaiki, agar bagus selalu karena itu menunjukkan bahwa untuk mempertahankannya sulit. Misalnya ada pergantian SDM/SDA yang sebenarnya sudah memahami dan harus dibimbing lagi yang baru karena itu harus dibagi ilmu agar berkembang juga atau jangan sampai mati langkah. Harus ada regenerasinya. Karena untuk mempertahankan kita harus lebih baik lagi saling kerjasama bagaimana membuat kota Bengkulu bagus.

Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang sesuai dengan karakteristik kualitatif agar dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tentunya diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan yang telah di jelaskan sebelumnya. Dengan demikian perwujudan dari laporan keuangan merupakan bentuk laporan informasi mengenai transaksi dalam organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan dalam menetapkan suatu kebijakan keuangan, yang mana laporan keuangan yang dihasilkan sudah memiliki karakteristik relevan, andal, serta dapat dibandingkan dengan laporan lainnya, dan mudah dipahami

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian oleh Fatma (2017) yang berjudul *Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten serdang bedagai)* mengungkapkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus di akuntansikan dengan benar. Dilaporkan secara lengkap Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Diaudit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering di lakukan auditor independent. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

Melengkapi penelitian tersebut, penelitian ini membahas lebih lanjut terkait karakteristik kualitatif kualitas suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi: Relevan; Andal; Dapat Dibandingkan; dan Dapat Dipahami yang mana berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa Kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang berhasil di capai di tahun 2021 adalah merupakan serangkaian proses panjang yang untuk penyusunannya harus dengan sinergi dan tanggung jawab oleh semua komponen di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu maupun OPD-OPD yang berada di dalam Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

IV. KESIMPULAN

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu telah dilaksanakan dan mendapatkan opini WTP, namun masih ada beberapa catatan di dalam penggunaannya LKPDnya, sehingga menjaga pencapaian prestasi tersebut merupakan bentuk menjaga kualitas yang sudah dicapai. Kondisi yang menjadi hambatan dalam mewujudkan LKPD Kota Bengkulu yang berkualitas adalah keberadaan SDM baik internal maupun eksternal SKPD, mutasi pegawai, pelaksanaan rekonsiliasi serta sarana dan prasarana. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan melakukan bimbingan SDM, komitmen pimpinan, tahapan percepatan penyusunan LKPD dan sinergi seluruh komponen dalam SKPD/OPD. Serta menerapkan serangkaian upaya kegiatan dan program sebagai berikut (1) Tertib pelaksanaan rekonsiliasi, kegiatan ini merupakan faktor pendukung lancarnya penyusunan sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Menjaga komitmen pimpinan dalam mendukung proses konsolidasi Laporan Keuangan sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang sifatnya dapat kita hindari baik dari dalam maupun luar pemerintahan, (3) Menjaga komitmen rencana percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. d. Melaksanakan pembimbingan dengan BPKP dalam menerapkan SAP berbasis akrual dan mengikuti seminar atau study banding ke daerah yang sudah baik dalam penerapannya.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya narasumber dan juga lokasi dimana tiap lokasi tentu memiliki hasil yang berbeda-beda pula.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya dan lebih melakukan analisa lanjut mengenai perbedaan hasil pada tiap penelitian sehingga dapat ditemukan informasi baru yang sekiranya akan bermanfaat dikemudian hari.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT.Indeks.
- Dermawan, J., & Darwanis, S. A. (2016). Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4).
- Efendi, R. (2021). Ruslan Efendi, 2021, Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan), Makasar, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unive. Skripsi.
- Fatma, D. A. (2017). *Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten serdang bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- MERLIANA, M. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87-97.
- Sakti, F. T., & Masitoh, S. (2018). Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 8.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wuriasih, A. (2019). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), 17-41.